

Rekonstruksi Tata Kelola Infrastruktur Publik Berbasis Agile Governance Untuk Mendukung Konektivitas Wilayah: Studi Jembatan Sentong Kabupaten Bondowoso

Agile Governance-Based Reconstruction Of Public Infrastructure Governance To Support Regional Connectivity: A Study Of The Sentong Bridge, Bondowoso Regency

Siti Khotijah¹, Susyliya Dwi Puspita², Akbar Maulana³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Jember

^{1,2,3}Ilmu Pemerintahan

e-mail: ¹ skhotijah629@gmail.com, ² Susyliadwipuspita@gmail.com,
³ akbar.maulana@unmuhjember.ac.id

ABSTRAK

Salah satu masalah infrastruktur publik yang mengganggu konektivitas wilayah dan aktivitas masyarakat adalah runtuhnya Jembatan Sentong di Kabupaten Bondowoso. Kerusakan jembatan tidak hanya mengganggu transportasi, tetapi juga memengaruhi ekonomi, distribusi barang, layanan publik, dan akses ke komunitas lokal. Kondisi ini menunjukkan bahwa tata kelola infrastruktur publik masih menghadapi banyak masalah. Ini termasuk sistem pengawasan yang buruk, pemeliharaan infrastruktur yang tidak optimal, respons kebijakan yang lambat, dan sistem mitigasi risiko pembangunan yang belum terintegrasi. Dalam upaya mendukung konektivitas wilayah di Kabupaten Bondowoso, penelitian ini menyelidiki rekonstruksi tata kelola infrastruktur publik yang berbasis Agile Governance. Studi ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui penelitian literatur, dokumentasi kebijakan, berita media, dan referensi ilmiah tentang Agile Governance, pembangunan infrastruktur, dan tata kelola pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah infrastruktur di Kabupaten Bondowoso tidak hanya disebabkan oleh faktor teknis; masalah ini juga dipengaruhi oleh pola tata kelola yang masih birokratis dan tidak adaptif terhadap perubahan, serta koordinasi kelembagaan yang lemah. Agile Governance menekankan fleksibilitas, kecepatan pengambilan keputusan, kolaborasi lintas sektor, pemanfaatan teknologi digital, dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur publik, yang membuat pendekatan ini menjadi relevan. Penelitian ini menunjukkan bahwa rekonstruksi tata kelola infrastruktur publik perlu diarahkan pada penguatan sistem monitoring, integrasi kebijakan pembangunan, peningkatan koordinasi antaraktor pemerintahan, serta pembangunan infrastruktur berbasis risiko dan keberlanjutan. Dengan demikian, Agile Governance dapat menjadi model tata kelola yang mendukung konektivitas wilayah dan pembangunan daerah yang lebih responsif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Agile Governance, Tata Kelola Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, Infrastruktur Publik, Bondowoso

ABSTRACT

One of the public infrastructure issues disrupting regional connectivity and community activities is the collapse of the Sentong Bridge in Bondowoso Regency. The bridge's damage not only disrupts transportation but also affects the economy, the distribution of goods, public services, and access to local communities. This situation indicates that public infrastructure governance still faces numerous challenges. These include poor oversight systems, suboptimal infrastructure maintenance, slow policy responses, and a development risk mitigation system that remains unintegrated. In an effort to support regional connectivity in Bondowoso Regency, this study investigates the reconstruction of public infrastructure governance based on Agile Governance. This study was conducted using a qualitative approach and a descriptive-analytical research design. Data were obtained through literature review, policy documentation, media reports, and scientific references on Agile Governance, infrastructure development, and public governance. The research findings indicate that infrastructure issues in Bondowoso Regency are not solely caused by technical factors; these issues are also influenced by governance patterns that remain bureaucratic and inflexible to change, as well as weak institutional coordination. Agile Governance emphasizes flexibility, rapid decision-making, cross-sectoral collaboration, the use of digital technology, and community involvement in public infrastructure management, making this approach particularly relevant. This study indicates that the restructuring of public infrastructure governance should focus on strengthening monitoring systems, integrating development policies, improving coordination among government actors, and implementing risk-based and sustainable infrastructure development. Thus, Agile Governance can serve as a governance model that supports regional connectivity and more responsive and sustainable local development.

Keywords: Agile Governance, Infrastructure Governance, Regional Connectivity, Public Infrastructure, Bondowoso

PENDAHULUAN

Infrastruktur publik sangat penting untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kualitas tata kelola infrastruktur publik sangat penting untuk keberhasilan pembangunan daerah karena konektivitas wilayah sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan pelayanan publik. Karena itu, infrastruktur seperti jalan dan jembatan memiliki peran strategis dalam memperkuat konektivitas wilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, dan mendukung distribusi barang dan jasa. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa infrastruktur publik beroperasi dengan baik dan berkelanjutan. Namun, banyak masalah terus muncul dalam praktik pengelolaan infrastruktur publik. Banyak infrastruktur rusak karena pengawasan yang buruk, pemeliharaan yang tidak efektif, keterbatasan anggaran, dan respons lambat pemerintah terhadap potensi kerusakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan infrastruktur publik tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga dengan sistem tata kelola pemerintahan, yang mencakup pengambilan keputusan, koordinasi kelembagaan, dan kemampuan pemerintah daerah untuk bertindak. Ambruknya Jembatan Sentong di Kabupaten Bondowoso adalah salah satu masalah infrastruktur yang menarik perhatian publik. Jembatan yang menghubungkan aktivitas masyarakat tersebut mengalami kerusakan yang signifikan, yang menyebabkan penutupan akses transportasi secara keseluruhan. Mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi di daerah tersebut sangat terpengaruh oleh peristiwa ini.

Masyarakat harus menggunakan rute yang lebih jauh dan lebih lama karena jembatan ditutup. Selain itu, gangguan transportasi menghambat aktivitas perdagangan, pelayanan publik, dan distribusi hasil pertanian. Kasus Jembatan Sentong menunjukkan bahwa sistem tata kelola infrastruktur publik lokal masih belum sepenuhnya mampu mengantisipasi risiko kerusakan dan perubahan kondisi lingkungan. Padahal infrastruktur publik memerlukan pengawasan berkala dan sistem monitoring yang berkelanjutan agar

kerusakan dapat dideteksi lebih awal, pemerintah dalam banyak kasus cenderung melakukan tindakan setelah terjadi kerusakan daripada memiliki sistem pencegahan dan mitigasi risiko yang terencana. Selain itu, koordinasi antarorganisasi perangkat daerah sering terjadi dalam pengelolaan infrastruktur publik. Penanganan kerusakan infrastruktur sering kali tidak berjalan efektif karena proses pengambilan keputusan yang birokratis dan lambat. Dalam beberapa situasi, kurangnya integrasi kebijakan dan kurangnya komunikasi antara antaraktor pemerintahan dapat memperlambat proses penanganan dan pemulihan infrastruktur yang rusak. Pemerintah daerah harus memiliki sistem tata kelola yang lebih responsif dan adaptif untuk menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan yang semakin kompleks (Wasistiono, 2019).

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah Agile Governance, model tata kelola pemerintahan yang menekankan adaptasi, fleksibilitas, inovasi, kolaborasi, dan pengambilan keputusan yang cepat. Metode ini muncul sebagai tanggapan terhadap sistem birokrasi konvensional, yang lambat dan tidak fleksibel dalam menanggapi kebutuhan masyarakat. Agile Governance menjadi penting dalam pengelolaan infrastruktur publik karena memungkinkan pemerintah daerah untuk membangun sistem tata kelola yang lebih responsif terhadap potensi kerusakan infrastruktur dan kebutuhan masyarakat. Strategi ini juga mendorong koordinasi lintas sektor yang lebih baik, penggunaan teknologi digital dalam sistem monitoring infrastruktur, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan. Kabupaten Bondowoso menghadapi banyak masalah dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur karena kondisi geografisnya yang unik. Pemerintah daerah harus membangun sistem tata kelola infrastruktur yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan, mitigasi risiko, dan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Ini karena faktor lingkungan, kondisi cuaca, dan potensi kerusakan alam harus dipertimbangkan dalam proses pembangunan infrastruktur publik. Penelitian ini penting karena dapat membantu mengembangkan model tata kelola infrastruktur publik yang lebih responsif dan adaptif. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pengelolaan infrastruktur publik agar mereka dapat mendukung konektivitas wilayah dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dengan menggunakan studi kasus Jembatan Sentong Kabupaten Bondowoso sebagai contoh, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi rekonstruksi tata kelola infrastruktur publik yang menggunakan Agile Governance untuk mendukung konektivitas wilayah.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Tata Kelola Pemerintahan (*Good Governance*)

Konsep *Good Governance* adalah teori yang menjelaskan bagaimana pemerintahan seharusnya dijalankan secara efektif, transparan, akuntabel, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Konsep ini muncul sebagai upaya untuk menciptakan sistem pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik secara optimal sambil mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Menurut Program Pembangunan Dunia (UNDP), *Good Governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan negara, sektor swasta, dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Dalam praktiknya, *Good Governance* menekankan pentingnya hubungan yang sinergis antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan kebijakan publik. Konsep ini menempatkan pemerintahan tidak hanya sebagai pelaksana kekuasaan administratif, tetapi juga sebagai fasilitator yang dapat membangun tata kelola yang transparan, demokratis, dan berfokus pada kepentingan umum. Baik pemerintahan didasarkan pada prinsip-prinsip berikut: partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, dan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Prinsip partisipasi menekankan bahwa orang harus terlibat dalam proses pengambilan keputusan sehingga kebijakan yang dibuat lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Transparansi berkaitan dengan seberapa transparan pemerintah terhadap masyarakat dalam hal memberikan informasi, terutama tentang pengelolaan anggaran dan pelaksanaan pembangunan.

Akuntabilitas, di sisi lain, berarti bahwa semua tindakan dan kebijakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (Sedarmayanti., 2012) .

Selain itu, prinsip efektivitas dan efisiensi dalam Good Governance menekankan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus mampu memanfaatkan sumber daya secara optimal untuk mencapai tujuan pembangunan. Selain itu, pemerintah diharuskan untuk menunjukkan responsivitas yang tinggi terhadap berbagai masalah publik, termasuk menangani kerusakan infrastruktur dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan yang baik adalah dasar yang penting untuk membangun pemerintahan yang profesional, fleksibel, dan berfokus pada pelayanan publik (Mardiasmo., 2009). Prinsip-prinsip Good Governance sangat penting dalam pembangunan infrastruktur publik karena mereka memastikan bahwa pembangunan dilakukan secara tepat sasaran, berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Infrastruktur publik yang dikelola dengan baik akan mendukung konektivitas wilayah, memperkuat aktivitas ekonomi, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sebaliknya, tata kelola yang buruk dapat menyebabkan pembangunan infrastruktur menjadi tidak efektif. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa proses pembangunan infrastruktur dilakukan secara transparan dan terbuka bagi publik, serta bahwa masyarakat terlibat dalam pengawasan proyek dan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk pemeliharaannya. Hal ini menunjukkan bahwa ada good governance dalam pengelolaan infrastruktur publik. Selain itu, sistem pengawasan dan evaluasi pembangunan harus berjalan secara optimal untuk menjaga kualitas infrastruktur dan mengurangi risiko kerusakan. Tanpa sistem tata kelola yang baik, infrastruktur publik yang dikelola berpotensi rusak karena kurangnya pengawasan dan pemeliharaan yang tidak optimal. Tidak cepatnya respons pemerintah, koordinasi yang buruk antarinstansi, dan keterlibatan masyarakat yang rendah dalam pengawasan pembangunan adalah semua faktor yang sering menyebabkan kerusakan infrastruktur. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak hanya ditentukan oleh elemen teknis, tetapi juga oleh seberapa baik tata kelola pemerintahan dilakukan. Kasus Jembatan Sentong di Kabupaten Bondowoso menunjukkan betapa pentingnya menerapkan prinsip pemerintahan yang baik dalam manajemen infrastruktur publik. Kerusakan jembatan menunjukkan masalah teknis dengan pembangunan serta masalah dengan sistem pengawasan, koordinasi lembaga, dan respons pemerintah daerah terhadap kondisi infrastruktur. Sulitnya menangani kerusakan dan terganggunya konektivitas wilayah menunjukkan bahwa pengelolaan infrastruktur publik masih membutuhkan perbaikan dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas kebijakan. Akibatnya, untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan infrastruktur dan mendukung konektivitas wilayah, pemerintah daerah perlu membangun sistem tata kelola yang lebih terbuka, responsif, dan partisipatif. Ini diperlukan agar pembangunan infrastruktur tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik semata, tetapi juga mampu menjamin keberlanjutan fungsi infrastruktur bagi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan ini digunakan karena tujuan penelitian adalah untuk memahami secara menyeluruh tentang tata kelola infrastruktur publik yang mendukung konektivitas wilayah melalui perspektif Agile Governance, karena masalah tata kelola infrastruktur tidak hanya dapat diukur melalui data kuantitatif, tetapi juga perlu dipahami melalui berbagai perspektif di luar data kuantitatif. Untuk memahami realitas yang terjadi di balik pengelolaan infrastruktur publik, diperlukan pendekatan interpretatif yang mampu menjelaskan hubungan antara kebijakan, aktor pemerintahan, dan sistem tata kelola infrastruktur secara menyeluruh. Ini terutama berlaku untuk kerusakan infrastruktur, yang merupakan fenomena yang kompleks, kontekstual, dan berkaitan dengan berbagai aspek pemerintahan. Model penulisan metodologi ini disusun dengan mengacu pada kerangka penelitian sebelumnya yang mempelajari fenomena tata kelola pemerintahan dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan secara sistematis keadaan tata kelola infrastruktur publik di Kabupaten Bondowoso dan menganalisis hubungan antara berbagai faktor yang memengaruhi pengelolaan infrastruktur tersebut.

Penelitian ini tidak hanya menjelaskan kondisi kerusakan Jembatan Sentong, tetapi juga menyelidiki komponen yang berkontribusi pada pengawasan infrastruktur yang buruk, respons kebijakan yang terlambat, koordinasi antarinstansi yang tidak optimal, dan dampak kerusakan pada konektivitas wilayah dan layanan masyarakat. Dalam penelitian ini, perspektif Agile Governance digunakan sebagai kerangka analisis utama. Agile Governance menganggap tata kelola pemerintahan sebagai sistem yang harus dapat beradaptasi secara cepat dan fleksibel dengan perubahan lingkungan, kebutuhan masyarakat, dan dinamika pembangunan. Menurut perspektif ini, tata kelola infrastruktur publik tidak hanya merupakan proses pembangunan fisik dan administratif; itu juga merupakan proses kolaboratif yang melibatkan berbagai aktor, termasuk masyarakat, teknologi, kebijakan, dan pemerintah. Metode ini membantu menjelaskan cara pemerintah daerah melakukan koordinasi kelembagaan, menciptakan respons terhadap kerusakan infrastruktur, dan membangun sistem pengawasan infrastruktur publik yang lebih fleksibel. Agile Governance juga digunakan untuk melihat bagaimana pemanfaatan teknologi, fleksibilitas kebijakan, dan kecepatan pengambilan keputusan dapat membantu tata kelola infrastruktur publik di daerah bekerja dengan baik. Sumber utama penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur dan dokumentasi. Penggunaan data sekunder memungkinkan penelitian memperoleh pemahaman yang lebih luas tentang dinamika pengelolaan infrastruktur publik karena penelitian ini bersifat konseptual dan analitis dan berfokus pada pengkajian teori dan interpretasi fenomena yang telah didokumentasikan dalam berbagai sumber tertulis. Metode penelitian dalam dokumen yang dijadikan acuan juga disesuaikan dengan pola penggunaan data sekunder ini.

Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini termasuk:

1. Jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pengelolaan infrastruktur publik, tata kelola pemerintahan, dan kebijakan agile dan baik.
2. Buku referensi yang membahas teori administrasi publik, tata kelola pemerintahan, manajemen infrastruktur, dan konektivitas wilayah.
3. Dokumentasi kebijakan dan peraturan pemerintah tentang pengelolaan dan pembangunan infrastruktur daerah.
4. Media dan sumber berita yang berkaitan dengan kerusakan Jembatan Sentong serta tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah dalam menangani masalah infrastruktur publik.

Tujuan dari penggunaan berbagai sumber data ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan validitas analisis melalui triangulasi sumber.

Mengumpulkan, membaca, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan subjek penelitian digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Lihat sumber data seperti jurnal ilmiah, buku, dokumen kebijakan, laporan pemerintah, dan berita media.
2. Tata kelola infrastruktur, konektivitas wilayah, koordinasi kelembagaan, pengawasan pembangunan, Agile Governance, dan respons kebijakan pemerintah daerah adalah beberapa contoh tema di mana data dikategorikan.
3. Untuk memudahkan proses analisis lebih lanjut, organisasi data dilakukan dalam bentuk catatan.

Data yang diperoleh melalui teknik ini tidak hanya informatif, tetapi juga disusun secara sistematis sehingga fokus penelitian dapat dianalisis secara menyeluruh. Model tahapan pengumpulan data ini serupa dengan pola penelitian dokumentatif dalam penelitian kualitatif deskriptif-analitis. Untuk membantu konektivitas wilayah di Kabupaten Bondowoso, rekonstruksi tata kelola infrastruktur publik yang menggunakan Agile Governance adalah fokus utama penelitian ini. Fokus penelitian ini adalah bagaimana pemerintah daerah mengelola infrastruktur publik sebagai bagian dari sistem pembangunan dan pelayanan masyarakat. Selain itu, penelitian ini berfokus pada elemen yang memengaruhi lemahnya pengelolaan infrastruktur publik. Ini termasuk koordinasi kelembagaan, pengawasan pembangunan, proses pengambilan keputusan, kemampuan pemerintah daerah, dan mitigasi risiko infrastruktur. Selain itu, penelitian ini melihat bagaimana kerusakan infrastruktur berdampak pada kualitas pelayanan publik dan konektivitas wilayah di

Kabupaten Bondowoso. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bondowoso karena dinamika masalah infrastruktur publik yang signifikan, terutama berkaitan dengan Jembatan Sentong, yang memengaruhi aktivitas masyarakat dan konektivitas wilayah. Kondisi ini menunjukkan bahwa tata kelola infrastruktur publik di daerah masih menghadapi masalah dalam hal pengawasan, pemeliharaan, dan respons kebijakan. Dalam penelitian ini, teknik analisis isi digunakan untuk menganalisis data. Metode ini digunakan untuk menemukan pola hubungan, bentuk kelemahan tata kelola, dan model rekonstruksi tata kelola infrastruktur publik yang berbasis Governance Agile. Selanjutnya, data yang diperoleh diperiksa secara menyeluruh dengan mengaitkan temuan empiris dengan gagasan teoritis yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini berusaha menjelaskan dinamika dalam tata kelola infrastruktur publik dan bagaimana Agile Governance dapat digunakan sebagai model pengelolaan infrastruktur yang lebih fleksibel, responsif, dan berkelanjutan untuk mendukung konektivitas wilayah di Kabupaten Bondowoso. Penelitian ini menggunakan teknik analisis isi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Infrastruktur dan konektivitas wilayah Bondowoso

Infrastruktur publik adalah komponen penting yang membantu konektivitas dan pembangunan wilayah. Kabupaten Bondowoso, salah satu wilayah di Provinsi Jawa Timur, memiliki karakteristik geografis yang sangat beragam, termasuk wilayah perbukitan, area aliran sungai, dan jalur antar kecamatan yang sangat bergantung pada infrastruktur jalan dan jembatan. Infrastruktur transportasi sangat penting untuk mendukung aktivitas sosial, ekonomi, dan pelayanan publik karena lokasinya. Kualitas infrastruktur publik, khususnya jalan dan jembatan yang menghubungkan wilayah pedesaan dengan pusat ekonomi dan pemerintahan, sangat memengaruhi konektivitas wilayah di Kabupaten Bondowoso. Infrastruktur yang baik akan mempercepat distribusi hasil pertanian, mempercepat mobilitas masyarakat, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Sebaliknya, kerusakan infrastruktur dapat menghalangi aktivitas masyarakat secara signifikan dan mengganggu kemajuan wilayah. Kerusakan Jembatan Sentong di Kabupaten Bondowoso adalah salah satu masalah infrastruktur yang menarik perhatian publik. Secara strategis, jembatan tersebut berfungsi untuk menghubungkan aktivitas masyarakat dan jalur distribusi ekonomi di daerah sekitarnya. Karena kerusakan yang terjadi, transportasi menjadi terganggu dan orang harus menggunakan rute lain yang memerlukan waktu yang lebih lama, yang berdampak pada mobilitas masyarakat dan mengakibatkan kerugian ekonomi karena meningkatnya biaya transportasi dan terhambatnya distribusi barang. Kerusakan Jembatan Sentong menunjukkan bahwa infrastruktur publik sangat terkait dengan efektivitas konektivitas wilayah. Infrastruktur yang rusak dapat menyebabkan pelayanan publik menjadi kurang baik dan pembangunan daerah menjadi lebih lambat. Oleh karena itu, sistem tata kelola yang tepat diperlukan untuk pengelolaan infrastruktur publik untuk menjaga keberlanjutan fungsi infrastruktur secara optimal.

2. Kondisi Tata Kelola Infrastruktur Publik pada Kasus Jembatan Sentong

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah utama Jembatan Sentong adalah kerusakan infrastruktur fisik dan tata kelola infrastruktur publik yang buruk. Pengelolaan infrastruktur lokal masih cenderung administratif dan reaktif, sehingga pemerintah baru melakukan tindakan ketika kerusakan terjadi dan memengaruhi masyarakat secara signifikan. Sistem yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pengawasan infrastruktur publik belum berjalan dengan baik. Pemerintah daerah masih memiliki keterbatasan dalam melakukan monitoring rutin terhadap kondisi infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan yang memiliki risiko kerusakan tinggi. Kurangnya sistem deteksi dini membuat kerusakan infrastruktur sulit diidentifikasi sejak awal, sehingga penanganan sering terlambat. Selain itu, koordinasi antarorganisasi perangkat daerah masih belum mencapai tingkat keberhasilan yang tinggi. Untuk mempercepat proses pengawasan dan penanganan kerusakan dalam pengelolaan infrastruktur publik, instansi teknis, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya harus bekerja sama. Namun, dalam kehidupan

nyata, koordinasi ini sulit dicapai karena hambatan birokrasi dan masalah komunikasi antarinstansi. Selama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur publik, sistem mitigasi risiko yang belum optimal juga merupakan masalah tambahan yang ditemukan.

Dimensi Agile Governance	Kondisi Eksisting Jembatan Sentong	Kondisi Ideal
<i>Sensing</i> (Deteksi dan Antisipasi)	Monitoring infrastruktur belum terintegrasi dan berkala.	Tersedia sistem deteksi dini dan monitoring digital.
<i>Securing</i> (Penguatan Kapasitas)	Koordinasi antarinstansi masih lemah dan respons kebijakan cenderung lambat.	Percepat pengambilan keputusan dan koordinasi lintas sektor
<i>Shifting</i> (Adaptasi dan Transformasi)	Tata kelola tetap lamban dan reaktif.	Tata kelola adaptif, kolaboratif, dan responsif terhadap perubahan

Kondisi lingkungan dan cuaca memengaruhi infrastruktur di Kabupaten Bondowoso, tetapi manajemen pembangunan infrastruktur belum memprioritaskan pengurangan risiko. Akibatnya, infrastruktur menjadi lebih rentan terhadap kerusakan ketika kondisi lingkungan berubah atau cuaca ekstrem. Kondisi ini menunjukkan bahwa tata kelola infrastruktur publik masih menghadapi masalah tentang seberapa efektif pengawasan, koordinasi kelembagaan, dan respons kebijakan pemerintah daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa beberapa indikator penting belum berjalan secara optimal ketika dilihat dari sudut pandang Agile Governance. Karena sistem monitoring belum memanfaatkan teknologi digital secara maksimal, masih ada ruang untuk inovasi dalam pengelolaan infrastruktur. Selain itu, koordinasi terstruktur antarorganisasi perangkat daerah masih menghadapi banyak tantangan birokrasi, yang memperlambat proses penanganan kerusakan. Situasi ini berbeda dengan fitur Agile Governance, yang menekankan kerja sama yang cepat, kerja sama tim, dan pendekatan adaptif untuk penyelesaian masalah (Kurniawan, 2021). Ini menunjukkan bahwa sistem tata kelola yang ada masih konvensional dan kurang adaptif terhadap perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakat. Hasilnya menunjukkan bahwa tata kelola infrastruktur Kabupaten Bondowoso masih menggunakan ciri-ciri birokrasi konvensional yang berfokus pada perbaikan daripada pencegahan. Menurut Agile Governance, organisasi publik harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi atau mengidentifikasi perubahan lingkungan secara cepat sehingga kerusakan dapat diantisipasi sebelum berdampak lebih besar. Menurut (Maulana A. P., 2023) organisasi yang cepat harus dapat membangun sistem yang responsif terhadap perubahan lingkungan melalui koordinasi yang lebih baik, pemanfaatan teknologi, dan pengambilan keputusan yang cepat. Pemerintah daerah cenderung merespons kerusakan setelah terjadi kerusakan karena kemampuan sensing Jembatan Sentong belum optimal.

3. Analisis Penerapan Agile Governance dalam Tata Kelola Infrastruktur Publik

Agile Governance menekankan pentingnya fleksibilitas, kecepatan respons, kolaborasi lintas sektor, dan penggunaan teknologi dalam proses pengambilan keputusan dan pelayanan publik. Konsep ini menjadi relevan untuk menjawab berbagai masalah tata kelola infrastruktur publik di Kabupaten Bondowoso. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode Agile Governance masih belum optimal untuk pengelolaan infrastruktur publik. Membangun sistem tata kelola yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi infrastruktur dan kebutuhan masyarakat masih menjadi tantangan bagi pemerintah daerah. Salah satu buktinya adalah bagaimana pemerintah tidak segera menangani kerusakan Jembatan Sentong, yang mengganggu aktivitas masyarakat.

Menurut Agile Governance, sistem pengawasan infrastruktur daerah masih dilakukan secara manual dan belum terintegrasi secara optimal. Menurut perspektif ini, sistem pengawasan infrastruktur yang terintegrasi dan berbasis teknologi seharusnya memungkinkan pemerintah daerah untuk melakukan tindakan preventif. Selain itu, Agile Governance menekankan bahwa semua pihak harus bekerja sama untuk menjalankan pemerintahan. Pemerintah daerah harus bekerja sama dengan sektor swasta, masyarakat, akademisi, dan berbagai pihak lainnya dalam pengelolaan infrastruktur publik untuk meningkatkan pengawasan serta mempercepat penanganan kerusakan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam mengawasi infrastruktur masih relatif terbatas dan bahwa pemerintah daerah belum memberikan fasilitas yang optimal. Agile Governance mengutamakan fleksibilitas kebijakan. Kebijakan pemerintah daerah harus dapat disesuaikan secara cepat dengan keadaan di lapangan. Namun, proses birokrasi yang panjang dan prosedur administratif sering menghambat pengambilan keputusan. Oleh karena itu, implementasi Agile Governance dalam pengelolaan infrastruktur publik Kabupaten Bondowoso masih membutuhkan penguatan dalam hal teknologi, koordinasi kelembagaan, dan kemampuan pemerintah daerah untuk menanggapi.

4. Dampak Kerusakan Infrastruktur terhadap Konektivitas Wilayah

Hasilnya menunjukkan bahwa rekonstruksi tata kelola infrastruktur publik yang berbasis Agile Governance diperlukan untuk menciptakan sistem pengelolaan infrastruktur yang lebih responsif, adaptif, dan berkelanjutan. Rekonstruksi tata kelola ini merupakan langkah penting dalam mendukung konektivitas wilayah di Kabupaten Bondowoso. Pertama, pemerintah daerah harus memperkuat sistem monitoring dan pengawasan infrastruktur berbasis digital. Teknologi ini memungkinkan pemerintah memantau kondisi infrastruktur secara real-time sehingga potensi kerusakan dapat dideteksi lebih awal. Sistem ini juga memungkinkan proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan lebih tepat. Kedua, bagian penting dari manajemen infrastruktur publik adalah meningkatkan koordinasi antarinstansi. Agar proses penanganan kerusakan infrastruktur dapat dilakukan secara lebih efektif dan terintegrasi, pemerintah daerah harus membangun pola kerja yang lebih kolaboratif antara organisasi perangkat daerah, pemerintah pusat, sektor swasta, dan masyarakat. Ketiga, pemerintah daerah harus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan infrastruktur publik. Masyarakat dapat memberikan informasi penting tentang kondisi infrastruktur di lapangan. Oleh karena itu, pemerintah harus menyediakan mekanisme pelaporan dan pengawasan partisipatif yang mudah diakses masyarakat. Keempat, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur harus didasarkan pada keberlanjutan dan mitigasi risiko. Dalam proses pembangunan infrastruktur, pemerintah daerah harus mempertimbangkan kondisi geografis, cuaca, dan potensi bencana agar kualitas infrastruktur lebih tahan terhadap perubahan lingkungan. Diharapkan bahwa pemerintah daerah dapat membangun sistem pengelolaan infrastruktur publik yang lebih efisien melalui rekonstruksi tata kelola yang didasarkan pada Agile Governance. Ini akan membantu dalam pembangunan berkelanjutan dan konektivitas wilayah.

PENUTUP

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian tentang penggunaan Agile Governance untuk rekonstruksi tata kelola infrastruktur publik untuk mendukung konektivitas wilayah melalui studi kasus Jembatan Sentong Kabupaten Bondowoso menunjukkan bahwa masalah infrastruktur tidak hanya disebabkan oleh masalah teknis, tetapi juga karena tata kelola infrastruktur publik yang buruk. Sistem monitoring dan pengawasan infrastruktur yang buruk, koordinasi antarinstansi yang buruk, respons kebijakan yang lambat, dan sistem mitigasi risiko yang tidak terintegrasi selama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur adalah beberapa contoh dari masalah ini. Kerusakan Jembatan Sentong mempengaruhi konektivitas wilayah, mobilitas masyarakat, distribusi barang, bisnis, dan layanan publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa infrastruktur publik memiliki fungsi strategis untuk mendukung pertumbuhan wilayah dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sistem tata kelola yang dapat menjamin keberlanjutan operasi infrastruktur diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- (2009)., M. (n.d.). *Akuntansi Sektor Publik*. . Andi Offset.
- (2012)., S. (n.d.). *Good Governance dan Good Corporate Governance*. . Mandar Maju.
- Ariyanto, A. &. (2021). Tata kelola infrastruktur publik dalam mendukung pembangunan daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 17(2), , 145–158.
- Firdaus, M. A. (2020). Implementasi good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1),, 22–34.
- Hidayat, T. &. (2022). Agile governance dalam transformasi pelayanan publik di era digital. . *Jurnal Borneo Administrator*, 18(1), , 55–70.
- Kurniawan, D. I. (2021). Agile governance sebagai bentuk transformasi inovasi pemerintah daerah. . *Dr. Diss. Univ. Muhammadiyah Jember*.
- Lestari, D. &. (2021). Konektivitas wilayah dan pembangunan infrastruktur daerah. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 17(3), , 210–223.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset.
- Maulana, A. P. (2023). Local government acceleration towards agile governance. *Journal of Humanities and Social Sciences Studies*, 5(1),, 105-113.
- Maulana, R. &. (2023). Tata kelola pembangunan infrastruktur berbasis kolaboratif pada pemerintah daerah. . *Jurnal Governance dan Kebijakan Publik*, 10(2),, 88–101.
- Prasetyo, H. (2020). Pengawasan infrastruktur publik dalam perspektif good governance. . *Jurnal Administrasi Negara*, 26(1), , 41–56.
- Putra, A. P. (2022). Agile governance sebagai model inovasi birokrasi pemerintahan daerah. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 7(2),, 95–109.
- Rahmawati, I. &. (2021). Responsivitas pemerintah daerah dalam penanganan infrastruktur publik. . *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 25(2), , 130–144.
- Sedarmayanti. (2012). *Good Governance dan Good Corporate Governance*. . Mandar Maju.
- Wahyudi, A. &. (2022). Infrastruktur publik dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia*, 23(1), , 77–91.
- Wasistiono, S. &. (2019). Three paradigms in government (good governance, dynamic governance, and agile governance). . *International Journal of Kybernology*, 4(2), , 79-91.